

Semrawut, Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang Ditertibkan

JAKARTA (IM) - Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri menggelar razia terhadap sejumlah lapak pedagang kaki lima yang nekat menggunakan trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi (11/4).

Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang ini seketika panik saat mengetahui kedatangan petugas.

Khawatir barang dagangannya diangkut petugas, mereka pun langsung berupaya merapkannya.

Sejumlah lapak pedagang kaki lima yang kedapatan berada di atas trotoar pun diminta petugas Satpol PP untuk segera dipindahkan, agar tidak mengganggu para pejalan kaki.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebut, jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang yang menjadi pusat ekonomi, memang kerap diserbu para warga dari sejumlah daerah, baik dari dalam kota maupun

“Ya ini masalah parkir di wilayah Tanah Abang sejak dulu menjadi masalah, di sini sentra ekonomi, banyak orang datang untuk belanja memenuhi kebutuhan Lebaran. Sarana dan fasilitas

parkir di gedung yang ada di kawasan Tanah Abang ini memang tidak memadai, itu harus kita akui, sehingga parkir-parkir liar di pinggir jalan kadang orang cari yang mudah saja, dia nggak mau parkir ke gedung, dia parkir saja di pinggir jalan. Akhirnya banyak oknum-oknum entah itu preman yang memanfaatkan peluang itu untuk menjadikan parkir liar yang dipungut semuanya,” kata Arifin, Selasa (11/4)

Selain itu, Arifin juga akan menindak para oknum yang kerap meminta pungutan liar, khususnya para juru parkir liar, yang memanfaatkan situasi.

“Oleh karena itu saya di jajaran Satpol PP dengan Dishub dan jajaran Wali Kota Jakpus akan menerbitkan, tidak boleh lagi ada pungutan liar, tidak boleh lagi ada parkir liar,” tambahnya

Selain pungutan liar, Petugas Satpol juga akan menindak para pedagang yang kerap berjualan di bahu jalan maupun trotoar.

“Kami akan tertibkan teman-teman dari kepolisian dari Polres Jakpus, Polsek Tanah Abang, TNI, Koramil, semua akan menjaga Tanah Abang biar lebih tertib lagi ke depan,” pungkasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



AKSI UNJUK RASA DI KPK RICUH

Pengunjuk rasa saling dorong dengan polisi saat mencoba menerobos masuk Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa (11/4). Unjuk rasa menuntut mundurnya Ketua KPK Firli Bahuri itu berlangsung ricuh serta ditandai dengan pelemparan tikus dan telur ke arah gedung KPK.

DIGUNDULI PADA ERA ANIES

Monas Kembali Dihijaukan dengan Ditanami 300 Pohon

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menjelaskan sebanyak 300 pohon akan kembali ditanam di Monas. Sebelumnya sejumlah pohon di Monas ditebang di era Gubernur DKI Anies Baswedan.

JAKARTA (IM) - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membahas revitalisasi Monas yang akan dimulai tahun ini. Basuki mengatakan Monas akan dihijaukan kembali setelah sebagian kawasan dibeton.

“Kita akan sangat kurangi betonnya, ini semua akan kita

coba untuk kembalikan lebih hijau makanya dari 50 sekian (ruang hijau) menjadi 64 persen,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

Basuki mengatakan desain revitalisasi Monas akan diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada Ketua Dewan Pengarah Penataan Kawasan. Pengerjaan akan dimulai tahun ini.

“Kita siap, sudah selesai tadi didesain masterplannya udah siap, ini akan kita bawa ke Dewan Pengarah Penataan Kawasan dan diketuai oleh Bapak Mensesneg. Akan segera kita laksanakan tahun 2023 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menjelaskan sebanyak 300 pohon akan kembali ditanam di Monas. Sebelumnya sejumlah pohon di Monas ditebang di era Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Kita ini kan spiritnya hijau ya. Itu ada lebih dari 300 pohon yang nanti akan ditanam dan kita juga tidak akan sembarangan take out pohon,” ungkap Afan.

Afan mengatakan nantinya kondisi pohon-pohon di Monas juga bakal diperiksa. Jika kondisinya rapuh, pohon tersebut akan ditangani petugas.

“Kalau kita men-take out, kita pasti sudah dilakukan USG terlebih dahulu. Jadi di-USG itu akan ketahuan pohonnya sebetulnya masih di posisi sehat atau enggak. Kalau pohon enggak sehat, itu pasti rapuh di dalamnya. Kalau dia rapuh, yang berbahaya ketika ada angin kencang bisa roboh dan mencelakai orang. Makanya di mana pun lokasi kita men-take out itu pasti screening-nya lewat USG terlebih dahulu, nggak asal,” ungkap Afan.

Afan mengatakan Pemprov DKI baru melakukan revitalisasi Monas tahun ini karena harus menyelesaikan proyek sodetan. Dia menjelaskan program prioritas dikerjakan satu per satu.

“Kan kita kan selesaikan satu per satu yang prioritas. Kemarin kan sodetan. Pak Gubernur punya prioritas itu. Kemarin prioritas yang banjir,” ujarnya.

Sebelumnya, revitalisasi kawasan Monas era Anies Baswedan menebang 205 pohon untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Revitalisasi kawasan Monas di era Anies sudah direncanakan Pemprov DKI sejak 2018 dengan total anggaran sebesar Rp 114,47 miliar.

Proses revitalisasi dimulai pada November 2019 dengan pengerjaan di sisi selatan Monas yang berhadapan langsung dengan kantor Anies di Balai Kota. Revitalisasi sisi selatan Monas pun rampung pada pertengahan 2021. Namun, proyek revitalisasi itu berhenti pada sisi selatan saja. Padahal, sejak awal revitalisasi direncanakan untuk seluruh kawasan Monas. ● yan



AKSI WARGA DI JALAN TOL JATIKARYA BERLANJUT Sejumlah warga melakukan aksi penutupan jalan Tol Jatikarya di Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/4) malam. Dari hasil kesepakatan dengan pihak kepolisian, warga ahli waris memilih bertahan selama tiga hari untuk menunggu keputusan pembayaran konsinyasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penggunaan tanah seluas 4,2 hektare dan hanya membuka sebagian ruas jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Jatikarya untuk dilalui kendaraan.

Guru P3K Geram dengan Sikap Arogan Plh Sekda Kota Bekasi

BEKASI (IM) - Ratusan aparat sipil negara (ASN) berstatus guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Bekasi kecewa dengan sikap arogan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kota Bekasi, Junaedi. Hal itu usai perwakilan P3K yang menggelar unjuk rasa di depan Pemkot Bekasi melakukan audiensi dengan Junaedi pada Senin (11/4).

“Kita kecewa begitu arogannya jawaban yang diberikan oleh sekda kepada perwakilan guru-guru P3K,” kata Maryani saat menyampaikan hasil pertemuannya dengan sekda.

Maryani mengatakan, saat menemui perwakilan guru P3K, Junaedi bukan memberikan penjelasan alasan terkait pemotongan tunjangan pendapatan penghasilan (IPP), tetapi malah memarahi guru yang turun ke jalan. Dia menyebut, ada bukti rekaman bagaimana Junaedi marah-marrah saat menerima perwakilan guru P3K.

Padahal, kata Maryani, perwakilan P3K hanya menagih dasar hukum pemotongan TPP sekitar 75 persen yang dilakukan Pemkot Bekasi. P3K bisa menerima jika pemotongan TPP itu ada undangan-undang yang mengaturnya. “Mereka tidak mau jawab apa yang kita tanyakan,” katanya.

Malahan, kata Maryani, perwakilan P3K mendapat intimidasi seakan-akan mereka melakukan perbuatan tindak pidana. Padahal, P3K ingin hanya ingin bertanya kenapa

haknya dipotong tanpa pemberitahuan.

“Kita tadi di dalam sudah kayak diinterogasi sama preman seolah-olah kita nyolong uang pemkot,” katanya.

Maryani menegaskan, Pemkot tidak bisa menjelaskan apa dasar hukumnya TPP untuk P3K dipotong. Sejak bulan Januari 2023, sambung dia, Pemkot Bekasi telah memotong TPP untuk P3K menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 4,5 juta.

“Mereka ketika menurunkan di angka Rp 1,5 juta tidak memiliki alasan yang mendasar berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dan sudah ditetapkan sebelumnya,” katanya.

Untuk itu, Maryani mempertanyakan mengapa ASN golongan PNS tidak dipotong, malah pendapatannya naik di angka Rp 5,2 juta sesuai upah minimum kota (UMK) Bekasi. Jika pemotongan itu berdasarkan efisiensi anggaran belanja sambung dia, PNS juga seharusnya mendapat potongan sama.

“Jika memang P3K Rp 3 juta maka PNS pun harus Rp 3 juta. Kami legowo jika memang seperti itu adanya,” katanya. Maryani menegaskan, status ASN golongan P3K bukan hadiah dari Pemkot Bekasi.

Setiap dari mereka berjuang keras untuk lulus panitia seleksi nasional (panselnas) ASN golongan P3K. “Jadi harga status kami, status kami bukan hadiah dari Pemkot, kami lulus seleksi ujian panselnas,” kata Maryani. ● yan

Perda RUED DKI Jakarta Ditargetkan Rampung Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (Perda RUED) selesai tahun ini. Perda ini mengatur kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Tahun ini Perda RUED selesai. Jadi tahun 2023 DKI sudah memiliki Perda RUED,” kata anggota Bapemperda DPRD DKI, Gembong Warsono, kemarin. Gembong mengatakan sangat penting bagi Provinsi DKI Jakarta untuk segera

memiliki Perda RUED. Selain merupakan sebuah keharusan berdasarkan amanat dari RUEN, perda ini membantu DKI mampu melakukan inovasi energi baru terbarukan.

“Ini menjadi penting guna menjaga lingkungan hidup,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Makmur Marbun juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian Perda RUED. Dia menyebut DKI Jakarta terlambat dalam membuat Raperda RUED ini.

Makmur mengatakan, Jakarta adalah satu dari empat provinsi yang belum memiliki Perda RUED.

“Saya sampaikan kepada

teman-teman di Bapemperda bahwa ini sudah sangat terlambat ya, DKI sudah sangat terlambat. Ini tinggal beberapa daerah yang belum membuat Raperda RUED ini,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Senin.

Selain itu, Perda Rencana Umum Energi Daerah juga dinilai penting dan sangat urgen untuk segera diselesaikan karena berkaitan dengan kewenangan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola energi di tingkat provinsi.

Oleh sebab itu, Makmur berharap pembahasan Rancangan Perda RUED Provinsi DKI Jakarta dapat segera selesai. “Mudah-mudahan Rancangan Perda ini diselesaikan dalam bulan April ya pak, karena saya pikir ini kan sangat urgen,” ujarnya. ● yan



KASUS STIKER QRIS PALSU DI KOTAK AMAL

Seorang jemaah menunjukkan sisa stiker kode QRIS palsu pada kotak amal yang dipasang oleh oknum warga di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta, Selasa (11/4). Polda Metro Jaya memastikan pelaku penipuan dengan modus mengganti stiker QR Indonesian Standard (QRIS) pada kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan dan Masjid Istiqlal adalah orang yang sama.

Heru: Insentif Pajak Kendaraan Listrik Bikin Pendapatan Jakarta Menurun

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pemberian insentif pajak pada pembelian kendaraan listrik membuat pendapatan DKI menurun.

Menurut Heru, keringanan ini akan membuat warga Ibu Kota terus membeli kendaraan listrik dan membuat pemasukan Jakarta menurun.

“Keterbatasan fiskal APBD sudah terlihat sejak awal, di mana ada kebijakan pemerintah pusat yaitu memudahkan kendaraan berbasis listrik, artinya penduduk DKI Jakarta akan membeli kendaraan listrik terus menerus meningkat,” kata Heru saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Balai Kota, Senin (10/4) kemarin.

Meskipun demikian, Heru tidak bermaksud untuk menentang program pemerintah tersebut. Nantinya, ia akan mencari sumber pendapatan lain.

“APBD kami, mungkin perlu kita pikirkan untuk mencari alternatif lain karena kendaraan listrik Rp0 pajaknya. Di sisi lain kami mendukung pemerintah pusat, di sisi lain pendapatannya pasti akan turun,” ujar Heru.

Diketahui, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, insentif PPN DTP untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember tahun ini.

“Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/4).

Menurut Luhut, pemberian program insentif ini sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019. Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu. ● yan

PENGUMUMAN

Direksi PT CIPTA KREASI SURYATAMA, berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) berencana untuk mengalihkan sebagian besar seluruh saham yang dimilikinya yang telah disetor dan ditempatkan dalam Perseroan kepada JHONY dan HENDRY WIJAYA, keduanya adalah Warga Negara Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), bagi para kreditur Perseroan yang keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan ke alamat Perseroan sebagai berikut:

PT CIPTA KREASI SURYATAMA
Ruko The Prominence 38E,
Alam Sutera Nomor 31,
Kelurahan Panunggangtan Timur,
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Provinsi Banten

Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan (8) juncto Pasal 127 ayat (8) UUPT.
Tangerang, 12 April 2023
DIREKSI PT CIPTA KREASI SURYATAMA